

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Swedia merupakan salah satu negara Skandinavia yang terletak di Benua Eropa bagian utara. Negara dengan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional ini kemudian mengejutkan dunia internasional dengan klaim kebijakan luar negeri mereka. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya, Koalisi Pemerintah Swedia merumuskan kebijakan luar negeri Feminis (Aggestam,2019). Selanjutnya, pada tahun 2015 pemerintah Swedia menyatakan klaim bahwa Swedia adalah Pemerintahan Feminis pertama di dunia (Aggestam,2016). Klaim yang menggunakan kata Feminis dalam kebijakan luar negeri Swedia menyorot banyak perhatian dan kritik yang tidak hanya berasal dari domestik, maupun dunia internasional.

Sebelumnya, Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia tidak melibatkan Feminis dan berfokus pada demokrasi dan kooperasi dalam bidang keamanan. Dalam masa kepemimpinan Carl Bildt sebagai Menteri Luar Negeri Swedia terdahulu, Carl Bildt aktif dalam advokasi terkait demokrasi dan ekspansi Uni Eropa yang lebih terbuka dan demokratis. Tindakan dan komitmen Bildt dalam promosi nilai demokrasi, dibuktikan dengan dukungan beliau terhadap ekspansi Uni Eropa bagian tenggara hingga ke Turki. Dalam pidatonya, Bildt berpendapat bahwa “ekspansi Uni Eropa merupakan salah satu instrumen yang membentuk terciptanya keamanan, demokrasi dan kesejahteraan....setiap langkah yang ditempuh untuk melakukan ekspansi membuat Uni Eropa menjadi lebih kuat, relevan, dan membentuk kesesuaian diri Uni Eropa terhadap masyarakat global lainnya Carl Bildt (2009). Tindakan promosi terhadap demokrasi yang dilakukan Bildt lainnya ialah semasa kepemimpinannya dalam kementerian luar negeri, Bildt sering berkunjung ke Ukraina untuk melakukan konferensi pers dalam hal demokrasi dan penyelenggaraan pemilu dan parlementer yang adil (Freedom House ,2014).

Selain isu demokrasi yang disebutkan, dalam memimpin Politik Luar Negeri Swedia Bildt menaruh perhatian terhadap isu keamanan. Komitmen Bildt terhadap isu keamanan regional lainnya yakni pernyataan akhir tahun beliau pada 2008 dimana sebelum terjadinya perang di Georgia, selaku Menteri Luar negeri Swedia, Bildt menyatakan bahwa sebagai salah satu negara anggota kooperasi Nordik, maka dengan tangan terbuka Bildt akan menerima kerjasama itu, pernyataan ini diperkuat kembali oleh Menteri Pertahanan Swedia yakni Sten Tolgfros yang menyatakan bahwa Swedia akan selalu membantu negara-negara tetangga nordiknya (Brommesson (2018). Selanjutnya, pada tahun 2009, Bildt mendukung pembentukan NORDEFKO (Nordic Defence Cooperation) yakni sebuah organisasi yang terbentuk dikawasan Nordik (Eropa Utara) yang bertujuan untuk membawahi inisiasi terkait dengan pertahanan dan keamanan dan meningkatkan kekuatan nasional negara anggota dalam bersinergi dan mencari solusi yang efektif terkait dengan isu keamanan (Sweden Parliamentary,2008). Ambisi Bildt terhadap isu keamanan sangat kentara hingga pernyataan beliau melihat Swedia sebagai negara yang berdedikasi terhadap keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia sehingga membuat posisi Swedia dalam perumusan kebijakan Uni Eropa sangat berpengaruh (Björkdahl, 2013).

Fokus arah dari kebijakan luar negeri Swedia sebelumnya tidak jauh dari demokrasi, keamanan serta isu mengenai HAM. Setelah masa kepemimpinan Carl Bildt, tongkat estafet kepemimpinan digantikan dengan terpilihnya Margot pada tahun 2014 yang merupakan seorang aktivis kesetaraan dan keadilan gender dan sering menyuarakan tindak anti kekerasan seksual untuk PBB (Aggestam,2018). Dengan terpilihnya Wallström, kebijakan luar negeri Feminis kemudian diluncurkan. Klaim terhadap kebijakan luar negeri Feminis ini muncul pada saat koalisi Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party*) dan Partai Hijau (*Green Party*) memenangkan koalisi pemerintahan pada tahun 2015.

Dalam kebijakan luar negeri Feminisme yang diadopsi, Margot Wallström mengemukakan bahwa kebijakan Feminis ini berpegang pada prinsip dasar yakni kesetaraan dan penyertaan wanita yang sering kali secara sistematis diabaikan keberadaannya. Terdapat tiga pilar yang menjadi fokus utama Margot Wallström

yakni; hak (*Rights*), representasi (*Representation*) dan sumber daya (*Resources*). Pilar yang pertama hak (*Rights*) merujuk pada kaum perempuan yang memiliki hak dalam advokasi dan promosi serta perlindungan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam bernegara. Selanjutnya, Representasi (*Representation*) yang berarti partisipasi dan representasi wanita serta pengaruhnya dalam perumusan dan pembuatan kebijakan dalam semua level bidang, terutama terkait dengan proses perdamaian. Yang terakhir sumber daya (*Resources*) berfokus pada keadilan dan pemerataan distribusi terkait sumber daya baik secara pendapatan, dan sumber daya alam dan bentuk dari aktualisasi dari penerapan HAM yang adil untuk semua kalangan (Poblete 2018).

Dengan dicanangkannya kebijakan luar negeri Feminis ini, tentu akan dilakukan penerapan terhadap rancangan kebijakannya. Adapun dalam proses penerapan kebijakan politik luar negeri feminis dibagi menjadi empat komponen yakni; Kepemimpinan (*leadership*), kepemilikan (*ownership*), bimbingan (*guidance*), dan yang terakhir adalah dukungan (*support*). Dalam menjelaskan proses implementasi pertama yakni kepemimpinan, kebijakan politik luar negeri Feminis ini, Pemerintah Swedia akan selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan menggaungkan rumusan ini dalam setiap kunjungan/visitasi, kampanye dalam media dan kontak lainnya dan menjadi inisiator dalam perumus dan eksekutor kebijakan. Komponen yang kedua yakni kepemilikan yang berarti, kebijakan politik luar negeri Feminis ini dibentuk dalam sistem hirarki (*top-down policy*) atau kebijakan yang berasal dari atas-ke-bawah, namun kebijakan ini kemudian dilaksanakan dengan konsultasi Pemerintah Swedia dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri Feminis Swedia tak lain adalah misi bersama semua pihak. Selanjutnya pada komponen ketiga, bimbingan atau (*guidance*) yang berarti bahwa kebijakan ini merupakan tanggung jawab semua pihak baik dalam proses perumusan maupun penerapan kebijakan ini. Terakhir, yakni dukungan (*support*) memiliki makna bahwa dalam penerapan kebijakan ini, seluruh pihak baik dari dalam maupun luar Swedia mendukung penerapan dan promosi dari visi kebijakan Feminsime ini (Sörbom, 2018).

Secara garis besar, terdapat dua aktor utama yang menjadi pioner penerapan kebijakan ini. Yang pertama adalah SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*), beserta Kementerian Luar Negeri Swedia. SIDA merupakan badan yang dibentuk dan bertanggung jawab untuk Parlemen Swedia terkhusus kementerian luar negeri. Dalam penerapan visi-misi kebijakan Feminis yang dilakukan, SIDA pada tahun 2014, menargetkan peningkatan kesehatan reproduksi dan hak kaum LGBT di Afrika terkhusus bagian selatan Sahara. Selain itu, SIDA mengadvokasi dan mendukung masyarakat Selatan Sudan dalam proses perdamaian yang dimana dukungan tersebut melibatkan suara wanita dalam proses perdamaian. Pada tahun 2009-2013 SIDA telah berkontribusi untuk 22 negara dalam mempromosikan kesetaraan gender dimana 8,3 juta wanita yang diberi bantuan akses pendidikan, satu juta wanita mendapatkan bantuan akses finansial dan 1500 organisasi Pernyataan yang diutarakan Margot Wallström pada tahun 2015 tentang Kebijakan Luar Negeri Feminis dalam Deklarasi Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Affair Declaration*) menjadi awal terbentuknya gagasan kebijakan ini.

Dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Feminis ini, Wallström mengungkap kalimat ini sebanyak tiga kali dalam pidatonya terkait arah kebijakan luar negeri Swedia. Dalam Pidato beliau yang disampaikan di Dewan Keamanan PBB tentang dukungannya terhadap kebijakan ini (Sörbom,2018).Selain dalam bentuk dukungan dan pernyataan terhadap kebijakan ini, beliau menggagas sebuah konferensi yakni *Stockholm Forum on Gender Equality*,yang menghimpun para ahli dalam bidang gender,peneliti,aktivis juga politisi untuk meningkatkan komitmen internasional terhadap agenda WPS (*Woman, Peace, Security*) (Aggestam,2019). Dengan uraian diatas dapat dilihat dengan jelas komitmen Pemerintah Swedia dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri Feminis. Selain itu, SIDA sebagai aktor kedua membuktikan komitmen dengan pemberian bantuan berkisar 2,905 juta Kronor Swedia kepada *Global Gender Equality* yang digunakan untuk mengupayakan peningkatan kesehatan dan tingkat kesejahteraan hidup perempuan yang lebih baik. Sebagai seorang menteri luar negeri, Margot Wallström menunjukkan dukungannya dalam kampanye serta advokasi dan pidato

beliau mengenai pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender untuk diterapkan dan dilaksanakan (Aggestam,2019).

Penelitian ini berkaca terhadap literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Feminis Swedia. Penelitian tersebut seperti karya Stephanie Lobos Poblete dengan penelitiannya yang berjudul *“Swedish Feminist Foreign Policy How can a feminist approach to foreign policy be understood?”* berpendapat bahwa Swedia dalam menerapkan kebijakan ini didasari oleh bagaimana pemahaman mengenai pendekatan konsep gender dan Feminisme dalam kacamata Pemerintah Swedia.

Penelitian lain mengenai alasan maupun motif yang mendasari Pemerintah Swedia dalam penggunaan Feminisme dalam kebijakan luar negeri yakni oleh Karin Aggestam dan Annika Bergman Rosamond dalam penelitiannya yang berjudul *“Re-politicising the Gender-Security Nexus: Sweden’s Feminist Foreign Policy”* beliau berpendapat bahwa alasan dibalik penerapan Feminisme dalam kebijakan luar negeri Swedia ialah bentuk politisasi agenda WPS (Woman, Peace and Security). Selanjutnya, masih dari Karin Aggestam dalam tulisannya yang berjudul *“Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics, and Gender”* mengemukakan bahwa sikap dan keputusan Swedia terkait dengan Feminisme dalam kebijakan luar negeri merupakan bentuk penerapan politik etis dan pragmatis terhadap cita-cita Swedia yang kembali lagi pada agenda *“More Women More Peace”*.

Tulisan-tulisan tersebut lantas menginspirasi penulis untuk kembali mengangkat dan berupaya untuk mencari alasan dibalik dicetuskannya kebijakan ini oleh Pemerintah Swedia. Dengan upaya untuk mendapatkan alasan dan sudut pandang baru mengenai faktor pendorong yang menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan ini serta penelitian ini bertujuan untuk mengafirmasi teori dalam menganalisis kebijakan luar negeri feminis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan sudut pandang baru mengenai alasan mengapa Pemerintah Swedia menerapkan kebijakan luar negeri Feminis sebagai tujuan dalam politik luar negeri Swedia dan dapat memberi sumbangsi dalam

khazanah studi Hubungan Internasional terhadap penerapan kebijakan luar negeri dan Feminisme sebagai teori yang ada dalam ilmu Hubungan Internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pernyataan yang telah dijelaskan penulis, penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci yakni: Mengapa Swedia memilih Kebijakan Luar Negeri Feminis sebagai tujuan dalam politik luar negeri di Swedia?

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam memberi defenisi dan perspektif mengenai analisa rumusan masalah, penelitian ini menggunakan Paradigma Feminisme. Kemudian penggunaan teori serta konsep Feminisme Liberal, Konsep kebijakan luar negeri serta, konsep level analisis kebijakan luar negeri yang digunakan untuk menelaah dan menjawab rumusan masalah terkait kebijakan luar negeri feminis Swedia.

### **1.3.1 Feminisme**

Feminisme dalam ilmu Hubungan Internasional menurut Steans J. dan Pettiford L adalah teori yang menggunakan gender sebagai kategori utama dalam analisis, menganggap gender sebagai bagian dari pola hubungan tertentu, menilik dikotomi antara publik dan privat, menggunakan isu-isu tentang gender sebagai upaya memberdayakan lembaga-lembaga internasional, serta menghimbau agar gender dianggap penting dalam tatanan internasional (Steans&Pettiford,2009). Kemudian pemahaman lain mengenai Feminisme menurut Burchill,(2005) bahwa Feminisme menganggap Hubungan Internasional terlalu bertumpu pada isu-isu maskulin seperti peperangan atau perlombaan senjata yang apada praktiknya merugikan perempuan. Oleh karena itu, Burchill dan Linklater menekankan bahwa Feminisme seharusnya diberi tempat yang layak pada khazanah Hubungan Internasional karena Feminisme menawarkan pemikiran kritis dan spesifik terkait dengan berbagai permasalahan di dunia ini. Burchill juga berpendapat bahwa para pemikir Feminisme dalam Hubungan Interasional menghadapi tugas meta-disipliner ganda yakni mereka menjadikan Hubungan Internasional “sensitif gender” di waktu yang sama sekaligus mengusung perspektif global atas kajian

perempuan yang meliputi upaya menguraikan heterogenitas diantara perempuan yang dipisahkan oleh hirarki,ras,kelas,etnik kebangsaan dan seksualitas serta terikat pada struktur global dan prosesnya. Tugas kedua ialah kaum Feminis berupaya untuk mendekonstruksikan berbagai bentuk penindasan terhadap gender. Pernyataan ini didukung oleh Adam Jones dimana beliau berpendapat bahwa kajian Feminisme dalam Hubungan Internasional akan menjadi *problem solver* untuk dunia lantaran Feminisme memiliki pandangan yang lebih lembut terhadap isu-isu yang sedang dihadapi dalam Hubungan Internasional (Jones,2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,Feminisme sebagai salah satu teori kontemporer dalam Hubungan Internasional yang selama ini melihat isu-isu seperti perang dan tindakan-tindakan militer yang akhirnya merugikan perempuan. Feminisme mengangkat derajat nilai-nilai feminim kaum perempuan yang berada dalam posisi marjinal, menjadi sebuah teori yang dapat menjadi alat analisis dalam ilmu Hubungan Internasional.

### **1.3.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy)**

Menurut George Modelski, bahwa kebijakan luar negeri adalah sistem tindakan yang ada di masyarakat dan ditujukan untuk merubah sikap negara lain untuk kepentingan negara tersebut dalam ranah aktivitas dunia internasional. Kebijakan luar negeri harus didasari dengan adanya tindakan untuk merubah dan bisa dikatakan berhasil apabila dapat merubah atau memengaruhi sikap maupun perilaku negara lain (Bojang 2018).

Adapun tujuan dari kebijakan luar negeri menurut (Breuning,2007:5) yakni untuk membangun dan mempertahankan serta meningkatkan kekuatan dan keamanan negara namun seiring berjalannya waktu tujuan tradisional tersebut kemudian bergeser dan berubah pada aspek perekonomian. Tidak hanya berhenti disitu, tujuan kebijakan luar negeri tak hanya berfokus pada aspek perekonomian, namun juga beralih ke isu lingkungan, HAM, pertumbuhan penduduk dan migrasi, pangan dan energi, bantuan luar negeri dan pembangunan oleh negara maju terhadap negara miskin maupun berkembang.Dengan beralihnya tujuan dari kebijakan luar negeri yang berawal dari isu tradisional digantikan dengan isu

kontemporer dan menjadi fokus dari kebijakan negara yang selaras dengan Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia yang melihat bahwa sasaran utama dalam kebijakan luar negeri tidak hanya ada pada isu tradisional namun sudah bergeser menjadi isu-isu seperti lingkungan dan gender.

### **1.3.3 Konsep Unit Level Analisis Kebijakan Luar Negeri**

Menurut Rourke,(2007) dalam analisis proses kebijakan luar negeri terdapat tiga level yakni; level analisis individu, level analisis negara, level analisis sistem. Analisis ini ditujukan untuk mempermudah dalam melihat kembali bagaimana proses pembentukan kebijakan luar negeri. Level analisis pertama yakni level analisis individu, analisis ini bermula dengan pandangan bahwa kebijakan luar negeri berawal dari para pemimpin atau orang-orang berpengaruh dalam penentuan kebijakan. Dalam level ini, terdapat tiga bagian dalam menelaah manusia sebagai spesies makhluk hidup. Yakni mengartikan sikap dan kebiasaan manusia yang akhirnya mendorong manusia dalam membuat dan menentukan kebijakan. Yang terdiri dari analisis manusia sebagai spesies makhluk hidup terdiri dari beberapa bagian lagi yakni; faktor biologis. kemudian perilaku organisasi individu. Perilaku individu dalam berkelompok dapat menjadi acuan dalam melihat kecenderungan keputusan yang akan diambil. Perilaku organisasi terbagi dua yakni; sikap kepemimpinan individu, sikap dalam pembuatan keputusan dengan organisasi. Terakhir, dalam sub level analisis individu juga menelaah faktor para pemimpin sebagai individu dan kebiasaannya. Dalam sub level analisis ini mengandalkan pendekatan idiosinkratik seperti; kepribadian pemimpin, kesehatan fisik dan mental, egodan ambisi, jejak politik dan pengalaman politis, persepsi pemimpin. Keseluruhan hal tersebut membentuk pemimpin dalam mengambil kebijakan

Selanjutnya, level analisis negara yang terbagi dalam tiga bagian yakni; jenis pemerintahan yang berlaku, situasi politik negara (kultur politik) dan lembaga yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Bagian pertama dalam sub level analisis ini ialah jenis pemerintahan yang berlaku di sebuah negara. Jenis pemerintahan dan ideologi yang dianut sebuah negara sangat berpengaruh dalam



penentuan kebijakan luar negeri. Selanjutnya kultur politik, merupakan konsep yang mencerminkan masyarakat secara garis besar seperti nilai-nilai tradisional dan praktek fundamental dalam kehidupan bernegara terkhusus politik. Sub terakhir dalam analisis ini ialah aktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Rourke yang mengutip pernyataan Henry Kissinger yang berpendapat bahwa aktor kebijakan luar negeri ialah para petinggi eksekutif, birokrasi, badan legislatif, oposisi pemerintah, kelompok kepentingan dan masyarakat. Seluruh aktor tersebut memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri. Singkatnya, Rourke menjelaskan bahwa karakter Negara dan sistem politiknya memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri (Rourke, 2007).

Terakhir, unit level analisis sistem yang berfokus pada pandangan dunia internasional dalam menentukan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini merupakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down policy*) dalam dunia politik yang menelaah karakter sosial-ekonomi-politik dan geografis sebuah negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Dalam unit ini, terdapat tiga sub bagian yakni; karakteristik struktural, keadaan ekonomi, dan norma. Karakteristik struktural menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap rezim internasional berpengaruh dalam perumusan dan pembentukan kebijakan domestik maupun luar negerinya. Kedua, yakni keadaan ekonomi sebuah negara berpengaruh terhadap prestis dalam diplomasi yang ia miliki dalam kancah internasional. Terakhir, norma dunia internasional biasanya turut mendorong dalam perubahan gaya dan sistem (Rourke, 2007). Rourke menekankan bahwa analisis dari berbagai level dilakukan agar dapat memahami bagaimana dinamika dan proses pembuatan kebijakan. Masing-masing dari level analisis tersebut memiliki peran dan pengaruh baik besar maupun kecil sehingga dapat disimpulkan level analisis yang menjadi faktor pendorong paling kuat. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan satu cara negara untuk mencapai tujuannya diluar dari batas wilayahnya dan dimulai dari isu-isu keamanan yang tradisional hingga isu kontemporer seperti lingkungan dan gender. Kemudian aktor dalam pembuat kebijakan tersebut dapat dinilai melalui tiga sisi yakni individu sebagai pemimpin,

negara serta birokrasinya serta pihak eksternal yang dapat menekan negara untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut.

#### **1.3.4 Konsep Kebijakan Luar Negeri Feminis (*Feminist Foreign Policy*)**

Adapun menurut Butler, pengertian dari Kebijakan luar negeri feminisme adalah sebuah tindakan yang merujuk kepada aksi yang dilakukan diluar batas nasional dan didasari oleh komitmen untuk menerapkan kesetaraan gender dan upaya untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah dominasi pria, ketimpangan gender dan devaluasi serta tuduhan dan melawan protes terhadap siapapun yang menentang konformitas yang ada terhadap stereotip gender tradisional. Stereotip gender tradisional yang hendak di entaskan dimana wanita cenderung dikesampingkan dalam berkuasa, dan pria lebih diutamakan dalam hal ini, *Feminist foreign policy* bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk ketimpangan dan diskriminasi serta pengentasan bentuk stereotip yang ada mengenai perempuan dan kekuasaan serta dominasi pria (Alwan,2017). Dalam tulisan Alwan dan Weldon untuk dapat memahami kebijakan luar negeri Feminis, maka terdapat tiga pendekatan yang dikemukakan antara lain yakni Feminisme Liberal, Anti Militer – Pasifis dan Feminisme Interseksional Global.

Feminisme Liberal adalah versi dimana feminisme fokus terhadap integrasi kaum perempuan dalam sebuah institusi, kemudian keadilan dimata hukum dan keberadaan perempuan dalam pemerintahan dan representasi dan kepemimpinan dalam ranah politik. Liberalisme yang pada dasarnya meyakini komitmen mengenai kesetaraan dan kebebasan individu serta keadilan dalam ranah hukum. Feminisme Liberal fokus pada keadilan dalam hukum serta Feminisme Liberal melihat bahwa negara merupakan alat untuk mencapai kepentingan feminis itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep Feminisme lain yang melihat negara adalah manifestasi kekuatan dan hierarki dan cenderung melihat negara sebagai aktor yang kejam terhadap perempuan. Komitmen terhadap hak-hak hukum dan proteksi terhadap wanita secara individual dan bukan kelompok merupakan perbedaan fokus pandangan Feminisme liberal dengan yang konsep feminisme lainnya.

Feminisme Liberal menurut Alwan dan Weldon, memiliki beberapa elemen yang sesuai dengan nilai Liberal dan Feminisme itu sendiri yakni; keberadaan wanita sebagai representasi politik dan wanita dalam pemegang kendali kebijakan, ratifikasi negara terhadap CEDAW (*Convention on the Elimination of Violence Against Women*), integrasi (persatuan) wanita serta hak-hak dan partisipasi wanita dalam militer, terakhir yakni bahwa negara memiliki rancangan nasional yang dapat memastikan penerapan serta pemenuhan hak-hak wanita dalam keadaan pra atau pasca konflik.

Menurut J. Ann Tickner,(2001) bahwa para pemikir feminis kontemporer yang berkaca dari sejarah panjang feminisme pada abad ke-17 hingga 19 dengan nama-nama pemikir feminisme seperti Christine de Pizan, Mary Astell, Mary Wollstonecraft dan Harriet Taylor. Masing-masing dari para pemikir feminisme berikut berpendapat bahwa kaum perempuan berhak mendapat hak yang sama dengan pria dimana asumsi dasar Feminisme Liberal bahwa setiap individu adalah aktor yang bebas menentukan segala tindakannya sama seperti pemikiran liberal yang melihat individu sebagai aktor yang rasional dan bebas. Feminisme liberal melihat bahwa diskriminasi menghalangi kesetaraan dan kesamaan hak serta mencederai nilai kebebasan individu sebagai aktor yang rasional terutama dari kaum pria terhadap wanita. Feminisme liberal percaya bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan bila wanita memiliki hak yang sama dengan pria, entah sebagai individu maupun kelompok. Saat masalah-masalah ketidaksetaraan gender ini dapat diatasi, maka feminisme liberal menganggap negara mampu untuk menjadi aktor netral yang dapat mengakomodasi semua kepentingan warga negaranya.

Dengan demikian asumsi dasar feminisme liberal menyatakan bahwa negara sebagai aktor utama dalam penerapan kebijakan diharuskan untuk bersikap adil serta mengakomodasi kepentingan semua pihak dan tidak timpang terhadap satu kelompok tertentu sehingga feminisme liberal melihat bahwa kesetaraan hak-hak tiap gender, kesamaan kedudukan di mata hukum menjadi titik temu dalam penyelesaian masalah isu-isu yang selama ini menjadi malah dari kacamata Feminisme.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perspektif yang dapat digunakan dalam memahami Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia ialah dengan pendekatan Feminisme Liberal, dikarenakan Kebijakan Luar negeri Swedia memiliki ciri dan kesamaan dengan nilai-nilai Feminisme Liberal seperti kesetaraan di mata hukum, kesetaraan gender, kebebasan hak-hak wanita serta partisipasi wanita dalam urusan politik bernegara nilai serta pandangan Feminisme Liberal selaras dengan tujuan kebijakan luar negeri Feminis yang diajukan oleh Menteri Luar negeri Swedia.

#### **1.4 Hipotesis**

Penelitian ini berargumen bahwa rumusan Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia didorong oleh para aktor seperti menteri luar negeri Swedia, kemudian pemerintahan Swedia dan organisasi internasional yang dimana Swedia merupakan bagian dari keanggotaan organisasi tersebut. Masing-masing aktor memiliki pengaruh serta peran dalam pembentukan kebijakan. Dengan peran dari masing-masing aktor maka diwujudkan dalam enam kebijakan eksternal (kebijakan luar negeri) pemerintah Swedia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian *Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia*, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. Metode kualitatif dalam penelitian akan menghasilkan data berupa kata-kata yang ditulis maupun diungkapkan secara lisan oleh setiap aktor. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat berisi penjelasan mengenai perilaku yang dilakukan oleh setiap aktor (Moleong, 2007). Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas dengan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Moleong, 2007). Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mencari sumber-sumber literasi melalui buku, jurnal, dan media massa yang terpercaya. Dalam hal interpretasi data, penulis menggunakan metode *process-tracing* yang mana berfokus pada proses terjadinya sesuatu. Metode ini meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu ‘sebab’ menghasilkan ‘akibat’. Peneliti memfokuskan penelitian pada variabel antara (*intervening variable*) yang

berfungsi menjembatani variabel independen dan dependen. Peneliti akan melakukan investigasi yang mendalam terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan kemudian dapat dipakai untuk menyusun narasi. Dalam penyusunan, peneliti mengidentifikasi tahap demi tahap dari sebuah proses sehingga dapat diketahui di titik mana terjadi perubahan dan kelanjutannya (Collier, 2011).

Untuk menjawab rumusan masalah mengapa Swedia memilih kebijakan luar negeri Feminis menjadi kebijakan luar negeri mereka maka penulis akan membedah dan mengumpulkan data mengenai cara proses dan bagaimana kebijakan luar negeri Feminis dibentuk melalui unit level analisis yang ada yakni unit level analisis individu, negara dan sistem (eksternal) yang menjadi aktor mendasar dalam perumusan hingga penerapan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan dianalisisnya aktor dibelakang perumusan kebijakan, penulis kemudian dapat menyimpulkan alasan mengapa Swedia memilih untuk menerapkan kebijakan luar negeri Feminis. Pada akhirnya, tahapan-tahapan ini secara perlahan dapat menjadi sebuah penjelasan yang menarik bagi pembaca.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat data-data serta argumen penulis mengantarkan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan pemaparan permasalahan secara sistematis, logis, konkret, dan spesifik. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan rumusan masalah dalam satu buah pertanyaan. Kerangka pemikiran berisi konsep serta teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menjawab permasalahan penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait permasalahan penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Terakhir dari Bab I, sistematika penulisan menjabarkan bagaimana rancangan laporan penelitian dan penjelasan substansi dari setiap bab.

Pada Bab II yang berisi data pendukung terhadap penelitian, penulis akan menjelaskan tindakan Swedia dalam menerapkan kebijakan luar negeri Feminis yang selaras dengan enam tujuan yang telah dicantumkan Swedia dalam *Sweden Handbook Foreign Policy*. Penulis juga akan menjabarkan mengenai apa saja yang telah dilakukan Swedia dalam menerapkan enam rumusan kebijakan tersebut dalam politik luar negeri Swedia.

Bab III berisi analisis mengenai alasan Swedia memilih kebijakan luar negeri Feminis dan dilihat melalui aktor –aktor yang berperan dalam merumuskan kebijakan Swedia yakni aktor dari level individu , level negara dan yang terakhir ialah level sistem dari negara Swedia. Pada bagian ini, dengan menganalisis peran dari aktor yang merumuskan kebijakan luar negeri Swedia, penulis akhirnya dapat menjawab rumusan masalah serta menyimpulkan alasan utama mengapa Swedia memilih kebijakan luar negeri Feminis.

Terakhir, Bab IV merupakan penutup di mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk keberlanjutan penelitian ini. Lebih jauh, bab ini akan mengemukakan hasil penelitian serta membuktikan apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal penulis atau justru bertentangan. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.